

Analisis Belanja Tidak Terduga pada Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Dasar

Saepudin, Agustin Vera Dewi

Universitas Pendidikan Indonesia
saepudin@upi.edu

Article History

accepted 1/1/2024

approved 1/2/2024

published 7/3/2024

Abstrak

One of the obstacles that is often overlooked in managing BOSP funds is unexpected spending activities. The aim of this research is to determine unexpected shopping activities in basic education units. The research method used in this research is a qualitative method with observation and interview techniques. The research results show that schools are still having problems anticipating unexpected shopping costs. Unexpected shopping is influenced by natural factors, damage and urgent student activities. Unexpected spending disrupts the effectiveness and efficiency of BOSP fund management. Some purchases cannot be included in SPJ BOS. Therefore, unexpected spending must be addressed and prevented through analysis and risk management.

Keywords: *Overcome Expenditure, The Education Unit Operational Assistance , Elementary Schools*

Abstrak

Salah satu kendala yang sering diabaikan dalam pengelolaan dana BOSP adalah kegiatan belanja tidak terduga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan belanja tidak terduga di satuan pendidikan dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah masih terkendala dalam mengantisipasi biaya belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dipengaruhi oleh faktor alam, kerusakan, dan kegiatan peserta didik yang mendesak. Belanja tidak terduga mengganggu efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana BOSP. Beberapa pembelanjaan tidak bisa di masukkan dalam SPJ BOS. Oleh karena itu, belanja tidak terduga harus diatasi dan dicegah melalui hasil analisis dan manajemen risiko.

Kata kunci: Belanja Tidak Terduga, BOSP, Sekolah Dasar



PENDAHULUAN

Modal finansial memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kegiatan dan program sekolah. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan dan program sekolah selalu berkaitan dengan proses pembiayaan. Berdasarkan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 BAB XIII Pasal 46 Tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber dana yang diberikan pemerintah pusat berasal dari APBN. Salah satu bantuan yang disalurkan pemerintah pusat yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Beberapa sekolah memiliki berbagai sumber pembiayaan seperti dari kantin sekolah, koperasi, usaha kebun sekolah, atau jasa antar jemput peserta didik. Namun BOSP tetap menjadi sumber utama pembiayaan di sekolah. Bahkan di beberapa sekolah, BOSP menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk semua kegiatan operasional. Adanya BOSP menjadi salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Fatonah (2021) bahwa terdapat korelasi atas pengaruh kontribusi manfaat dana bantuan operasional sekolah terhadap mutu proses pembelajaran. Kemudian, Maliki (2020) dari hasil penelitian studi pustakanya menyatakan bahwa dana BOS memiliki peranan yang sangat penting, strategis, dan konstruktif bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan. Kesimpulannya, dana BOSP berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar sekolah sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik.

Hadirnya BOSP selain memberikan manfaat untuk keberlangsungan proses pendidikan, juga memiliki risiko dalam pengelolaannya. Sejak awal diluncurkan program BOSP, banyak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa penelitian yang membahas tentang masalah pengelolaan dana BOSP di sekolah. Pertama, dalam penelitiannya (Wardani et al., 2019) menyimpulkan bahwa kecurangan/ fraud dalam pengelolaan dana BOS disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal yaitu opportunity dan exposure seperti kurangnya pengawasan dari orang tua sebagai masyarakat dan faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri seperti sifat yang serakah serta adanya kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan seseorang tersebut melakukan kecurangan. Kedua, dalam penelitian (Jamilah, 2023) menyatakan bahwa penyebab ketidaksesuaian penggunaan dana BOSP dengan buku petunjuk karena kurangnya pemahaman dari kepala sekolah dan guru dalam pembuatan RAPBS dan SPJ BOS serta tidak adanya tenaga khusus sehingga pengelolaan administrasi dana BOS tidak tepat. Penelitian yang ketiga (Mauludi, 2021) menyatakan bahwa penyebab tenaga kependidikan melakukan tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah, diantaranya yang dapat menjadi peluang besar tenaga kependidikan melakukan kejahatan yaitu kurangnya pengawasan oleh beberapa instansi yang bertanggungjawab seperti Inspektorat Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi. Permasalahan pengelolaan dana BOSP di atas dapat disimpulkan karena kurangnya pengawasan dan antisipasi terhadap kemungkinan kecurangan yang terjadi.

Kamis 10 Agustus 2023 Bendahara SD Negeri Cilangkap, Bapak Asep Mumu, M.Pd. menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dan pengembangan untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOSP. Namun, sampai saat ini masih saja terjadi permasalahan terkait Dana BOSP di berbagai satuan pendidikan. Salah satu kendala yang masih sering terjadi yaitu risiko yang dihadapi satuan pendidikan saat harus mengatasi pengeluaran tak terduga dan urgen. Bagi sekolah yang memiliki sumber pembiayaan selain BOSP, pengeluaran tak terduga bisa

diatasi tanpa mengubah rencana anggaran dana BOSP. Namun, bagi sekolah yang hanya memiliki sumber pembiayaan dari BOSP tentu harus mencari solusi alternatif lain.

Ada beberapa penelitian yang penulis jadikan acuan, sehingga dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian ini. (Rekasari, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran tak terduga atau bersifat insidental menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian pembelanjaan keuangan sekolah antara pendapatan dan realisasi belanja sekolah dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Masih banyak anggaran-anggaran yang jumlahnya tidak terduga, padahal semestinya pengeluaran anggaran belanja berpegang teguh pada rencana yang telah dibuat (Rekasari, 2020).

Dari pernyataan di atas, diperlukan alternatif solusi untuk mengatasi atau mencegah permasalahan yang disebabkan oleh anggaran biaya tidak terduga. Salah satunya dengan cara menganalisis data terkait pengeluaran anggaran biaya tidak terduga yang sudah terjadi kemudian membuat manajemen risikonya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait “Analisis Belanja Tidak Terduga pada Pengelolaan BOSP Sekolah Dasar” untuk mencari tahu apa saja anggaran pembelanjaan tidak terduga dalam pengelolaan pembiayaan di satuan pendidikan dasar.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kendala pengelolaan anggaran pembiayaan di sekolah dasar (SD). Menurut Moleong dalam (Adlini et al., 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian dilakukan di SD Negeri Cilangkap Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Alasan memilih SD Negeri Cilangkap sebagai objek penelitian karena pengelolaan anggaran belanja tidak terduga di SD Negeri Cilangkap masih belum dirancang dengan baik. Informasi data tersebut diperoleh dari bendahasa sekolah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Insan et al., 2022). Sedangkan Berger menyatakan wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh percakapan antara peneliti (seseorang yang berharap mendapatkan informasi data) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek)” (Kriyantono dalam (Mardati, 2021)). Selain itu, data dalam penelitian ini peneliti analisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Umrati, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana BOSP

Pada tahun anggaran 2023, SD Negeri Cilangkap memiliki alokasi dana BOSP sebesar Rp. 177.300.000,-. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan SD lain di Kecamatan Karangnunggal karena memiliki jumlah peserta didik di bawah 200 orang. Sampai saat ini, sumber pembiayaan SD Negeri Cilangkap hanya dari BOSP reguler saja. Sumber pembiayaan lain berupa sumbangan dari masyarakat atau orang

tua peserta didik sesekali dilakukan untuk kegiatan yang memerlukan biaya besar dan mendesak seperti kegiatan kenaikan kelas. Pengelolaan sumber pembiayaan dari sumbangan orang tua peserta didik biasanya sepenuhnya dikelola oleh komite sekolah. Salah satu peran dan fungsi komite di jelaskan oleh (Suteng Sulasmono & Murjini, 2017) yaitu sebagai penghubung dalam hal pengelola sumber daya pendidikan dilakukan melalui pengindentifikasian kondisi sumber daya di sekolah dan masyarakat, sekaligus mobilisasi dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat juga sudah berjalan.. Sedangkan pihak sekolah berperan mengoptimalkan pengelolaan dana BOSP reguler saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BOSP, beliau mengatakan bahwa pengelolaan dana BOSP SD Negeri Cilangkap sudah sesuai dengan juknis yang berlaku. Tahapan yang dilakukan mencakup perencanaan, realisasi, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika ketiga tahapan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seharusnya pengelolaan berjalan dengan efektif dan efisien. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam keefektifan penggunaan dana BOSP. Apabila pada tahap perencanaan (RKAS) tidak segera diselesaikan akan berdampak pada pelaporan dana BOS pada triwulan tersebut karena dasar dari pelaporan dana BOS adalah RKAS (Witanto et al., 2019). Dalam implementasi tahap perencanaan pengelolaan dana BOSP, di SD Negeri Cilangkap belum ada pertemuan khusus antara tim pengelola BOSP untuk menyusun dokumen RKAS. Rincian komponen pembiayaan secara garis besar biasanya didiskusikan oleh kepala sekolah, bendahara, dan guru-guru.

Kemudian tahap yang kedua yaitu realisasi atau pelaksanaan. Dana BOS dapat dikategorikan efektif apabila jumlah realisasi setiap indikator sudah hampir sama dengan target atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fauziyyah et al., 2018). Dana BOSP SD Negeri Cilangkap dialokasikan untuk 10 komponen sebagai berikut :

Tabel 1 Komponen Dana BOSP SD Negeri Cilangkap

No.	Komponen
1	Penerimaan Peserta Didik Baru
2	Pengembangan perpustakaan
3	Pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4	Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran
5	Administrasi Kegiatan
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
7	Layanan Daya dan Jasa
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Sekolah
9	Penyediaan Alat Multi Media
10	Pembiayaan Honor

Jika ada dana yang belum direalisasikan pada tahap I, maka penundaan belanja tersebut masih bisa diatasi dengan cara merealisasikannya pada tahap berikutnya melalui RKAS Perubahan. RKAS perubahan adalah perubahan anggaran karena berbagai alasan dan perubahan kondisi tertentu maka RKAS yang sudah disepakati sebelumnya (Suandi, S., Aunurrahman, A. & Radiana, 2024)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Tidak Terduga

Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pembelanjaan dana BOSP jika terus diabaikan bisa mengganggu keefektifan pengelolaan dana BOSP. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurrochman, dkk. di SD Negeri Sawahan didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana sudah dilakukan dengan semestinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kebutuhankebutuhan lain yang muncul atau kebutuhan tak terduga, hal ini disebabkan karena dalam perencanaan penggunaan dana BOS reguler masih ada yang belum tercatat, atau dalam mengestimasi kebutuhan sekolah masih ada yang terlewat, selain itu ada kebutuhan yang tak terduga yang tidak bisa sepenuhnya tercover oleh dana BOS reguler, karena akan mengganggu kegiatan lain yang didanai oleh dana BOS (Nurrochman et al., 2023). Salah satu permasalahan yang dialami SD Negeri Cilangkap yaitu adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dana BOSP dengan dokumen yang telah diinput pada ARKAS. Kendala yang terjadi karena adanya kegiatan belanja yang sebelumnya tidak dianggarkan di RKAS sehingga menghambat dalam proses pelaporan. Bendahara menjelaskan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena sekolah harus mengeluarkan anggaran untuk beberapa kegiatan belanja yang bersifat mendadak dan urgen. Beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan belanja tidak terduga yaitu :

a. Faktor Alam

Faktor alam mencakup segala hal yang bersifat alami dan dapat mempengaruhi lingkungan serta kehidupan manusia. Ini termasuk iklim, cuaca, bencana alam, serta aspek-aspek ekologi dan geologi yang berdampak pada aktivitas manusia dan ekonomi. Salah satu contoh faktor alam yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan dana BOSP di SD Negeri Cilangkap adalah musim kemarau.

Kemarau panjang terjadi sejak bulan Mei sampai bulan Oktober 2023. Kondisi Desa Cibatu lokasi SD Negeri Cilangkap menjadi salah satu daerah yang terdampak kekeringan. Pada awal musim kemarau, warga sekolah masih bisa mengatasi kesulitan air dengan ikut ke rumah warga atau menggunakan fasilitas umum seperti masjid. Semakin lama sumur warga sekitar dan masjid juga mengalami kekeringan. Kondisi ini menghambat kegiatan dan kebutuhan peserta didik serta guru-guru. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pihak sekolah kemudian berkonsultasi dengan masyarakat. Akhirnya diperoleh solusi dengan cara mengambil air dari sumber warga namun jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu, sekolah kemudian mengeluarkan anggaran untuk membeli peralatan seperti selang, gentong air, dan mesin air. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah dengan cara memperdalam sumber air. Sehingga sekolah juga mengeluarkan anggaran untuk upah menggali sumur. Rincian pembelanjaan sebagai berikut :

Tabel 2 Rincian Pembelanjaan Musim Kemarau

No.	Pembelanjaan	Satuan	Harga
1	Selang air Cobra Mas Dop	1 roll	Rp. 580.000,-
2	Bak Air	150 L	Rp. 220.000,-
3	Mesin Pompa Air Shimizu	1 buah	Rp. 636.000,-
4	Upah menggali sumur	2 hari	Rp. 200.000,-
Total			Rp. 1. 636.000,-

Sumber : Dokumen Bendahara SD Negeri Cilangkap

Pembelajaan ini dilakukan setelah RKAS Perubahan, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak masuk dalam pelaporan atau SPJ BOS. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi dalam menyusun RKT dan RKAS tahun anggaran 2024.

b. Perbaikan Mendadak

Ketika menyusun RKAS dan RAPBS, setiap item pembelian dipertimbangan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi pembiayaan. Terbatasnya sumber pembiayaan tidak sebanding dengan kompleksnya kegiatan dan anggaran yang seharusnya tersedia. Kendala utama pada pelaksanaan keuangan sekolah yaitu keterbatasan dana dan perubahan harga barang yang semakin naik, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak (Iskandar, 2019). Oleh karena itu, dalam menentukan jumlah anggaran untuk pembelian perlengkapan pembelajaran seperti bola, catur, dan media pembelajaran, perawatan sarana dan prasarana pembelajaran tim penyusun BOS akan memprioritaskan hal-hal yang memang sudah terlihat perlu dilakukan tindakan. Namun, ternyata ada saja kejadian yang tidak terprediksikan dan harus segera diatasi. Beberapa kejadian yang dialami SD Negeri Cilangkap yaitu bola pecah, jendela kaca pecah, kunci pintu rusak, dan perbaikan atap kelas yang bocor.

Perbaikan atap kelas awalnya tidak terprediksikan dan diprioritaskan karena selama musim kemarau tidak terlihat ada indikasi kebocoran. Saat ada hujan memasuki akhir bulan November 2023, salah satu kelas mengalami kebocoran yang cukup parah dan mengganggu proses pembelajaran. Sehingga sekolah harus segera memperbaikinya. Anggaran perbaikan atap kelas ini juga tidak dimasukkan pada Perubahan RKAS.

c. Kegiatan Peserta Didik

Salah satu kegiatan peserta didik yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2021 adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Sumber pendanaan program ANBK berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Mahatika, A., & Trisoni, 2022). Peserta didik yang melaksanakan ANBK adalah kelas V. Tahun pelajaran 2021/2022 dan 2022/2023, teknis pelaksanaan ANBK dilakukan disatu titik dalam satu gugus. Banyak kendala yang dihadapi antara lain jarak, waktu, dan kondisi peserta didik. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah antar warga sekolah, pada tahun pelajaran 2023/2024, SD Negeri Cilangkap memutuskan untuk melaksanakan ANBK secara mandiri. Hal ini didukung dengan adanya bantuan Crhomebook sebanyak 13 unit.

Pelaksanaan ANBK secara mandiri berdampak pada perubahan pengalokasian dana. Meskipun sekolah sudah memiliki Crhomebook, diperlukan juga fasilitas penunjang lainnya seperti instalasi listrik dan penambahan daya akses internet. Hal ini tidak sesuai dengan rencana awal di RKAS, karena pada saat penyusunan RKT kegiatan ANBK direncanakan bergabung seperti tahun sebelumnya.

Dampak Kegiatan Belanja Tidak Terduga

Dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 dalam (Azizah, Nur, 2019) tentang juknis BOSP dijelaskan bahwa tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP yaitu :

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP
- b. Kegiatan mencakup pemeriksaan dan verifikasi

- c. Dokumen pelaporan sesuai dengan yang tercantum pada sistem ARKAS
- d. Satuan pendidikan bersedia diaudit

Kegiatan belanja tidak terduga akan mempengaruhi pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP di SD Negeri Cilangkap. Kegiatan belanja tidak terduga menyebabkan beberapa pembelanjaan tidak bisa di masukkan pada SPJ BOS. Permasalahan ini harus diperbaiki dengan meningkatkan manajemen risiko dalam pengelolaan dana BOSP. Pada manajemen risiko ada tiga termin krusial, yaitu identifikasi, pengukuran dan pemetaan risiko (Hotdiana H. et al., 2022).

Selain itu, terdapat beberapa penyedia barang/jasa yang tidak memiliki administrasi legal seperti nota, kwitansi, NPWP, dan stempel. Di dalam dokumen pelaporan penggunaan dana BOSP harus memuat bukti realisasi yang sudah diinput pada ARKAS yang dilengkapi dengan bukti fisik pembelian. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah (Alumudy, 2018). Permasalahan ini menjadi pelajaran dalam penyusunan tahap selanjutnya untuk melakukan transaksi dengan penyedia barang/jasa resmi atau melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIPLah ini memberi manfaat besar bagi satuan pendidikan dalam sebagai pihak yang membutuhkan barang/jasa dan penyedia barang/jasa (Darmawan & Wardhono, 2023).

Permasalahan dalam pengelolaan dana BOSP di SD Negeri Cilangkap memang bukanlah kegiatan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Namun jika diabaikan maka akan menjadi masalah yang lebih besar dan berbahaya bagi kelangsungan sekolah. Oleh karena itu, SD Negeri Cilangkap harus secepatnya mengevaluasi dan memperbaiki tahapan dalam proses perencanaan, realisasi, dan pelaporan pertanggungjawaban.

SIMPULAN

BOSP SD Negeri Cilangkap sudah cukup sesuai dengan juknis yang berlaku. Tahapan yang dilakukan mencakup perencanaan, realisasi, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu permasalahan yang dialami SD Negeri Cilangkap yaitu adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dana BOSP dengan dokumen yang telah diinput pada RKAS. Kendala yang terjadi karena adanya kegiatan belanja yang sebelumnya tidak dianggarkan di RKAS sehingga menghambat dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam implementasi tahap perencanaan pengelolaan dana BOSP, di SD Negeri Cilangkap belum ada pertemuan khusus antara tim pengelola BOSP untuk menyusun dokumen RKAS. Rincian komponen pembiayaan secara garis besar biasanya didiskusikan oleh kepala sekolah, bendahara, dan guru-guru. permasalahan tersebut terjadi karena sekolah harus mengeluarkan anggaran untuk beberapa kegiatan belanja yang bersifat mendadak dan urgen. Beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan belanja tidak terduga yaitu faktor alam, kerusakan sarana dan prasaranan, dan kegiatan peserta didik yang mendadak. Dampak dari kegiatan belanja tidak terduga menyebabkan beberapa pembelanjaan tidak bisa di masukkan ke dalam SPJ BOS. Pihak sekolah harus menyusun analisis risiko dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan BOSP.

DAFTAR PUSTKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. 6(1), 974–980.

- Alumudy, W. G. (2018). Analisis Pencatatan Akuntansi Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Di Smk Negeri 1 Lunyuk). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.37673/jebi.v3i2.30>
- Azizah, Nur, S. K. S. dan S. W. (2019). Jurnal Dirosah Islamiyah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i3.5066>
- Darmawan, & Wardhono, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana BOS Melalui Aplikasi SIPLah dalam Perspektif Smart Governance. *Jurnal Mahasiswa Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(1), 1–26. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/5742>
- Fatonah, N. (2021). Manfaat Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Mutu Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 15(2), 474. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i2.1382>
- Fauziyyah, N. A., Mulyani, H., & Purnamasari, I. (2018). Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15828>
- Hotdiana H., F., Yani, A. A., Putri, M., & Suhairi, S. (2022). Analisis Resiko Bisnis. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 119–125. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.959>
- Insan, H. S., Tanjung, R., Karawang, A. K., Islam, U., & Bandung, N. (2022). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Karawang*. 5, 349–356.
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan. *Idarah*, 3(1), 114–123. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>
- Jamilah, J. (2023). Dinamika Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana Tahun 2021. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(5), 352–374. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i5.526>
- Mahatika, A., & Trisoni, R. (2022). The Effectiveness of ANBK Implementation in Raising the Educational Quality of Elementary School. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 6(2), 173-184.
- Maliki, B. I. (2020). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Alfithrah*. <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/66>
- Mardati, A. (2021). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa*. UAD Pres.
- Mauludi, D. R. (2021). BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tindakan pidana korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan (. *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tindakan Pidana Korupsi Merupakan Tindakan Penyalahgunaan Jabatan* (, 02(02), 1–7.
- Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60–70.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>

Rekasari, M. H. (2020). Jurnal manajer pendidikan. *Pengelolaan, Efektivitas Sekolah, Keuangan*, 14(2).

Suandi, S., Aunurrahman, A., & Radiana, U. (2024). *MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 SAMBAS*. 7, 2–6.

Suteng Sulasmono, B., & Murjini, M. (2017). Evaluasi Kinerja Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(1), 113–121.
<https://doi.org/10.21831/cp.v36i1.10431>

Umrati, H. W. (n.d.). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. 86.

Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.

Witanto, J., Ismanto, B., & . W. (2019). Peningkatan Efektifitas Perencanaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Mendukung Kebutuhan Anggaran Berbasis Mutu Melalui Workshop Di Dabin Iii Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 250. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v8i2.22625>